SURVEI

REFLEKSI 20 TAHUN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



Latar Belakang & Tujuan

Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta lembaga Komnas HAM

CURRENT ISSUE

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia** menjadi landasan bagi perlindungan HAM bagi masyarakat sekaligus menjadi dasar dibentuknya lembaga **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

STRATEGIC OBJECTIVE

Lembaga Komnas HAM memandang perlu untuk melakukan refleksi dan evaluasi 20 tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 untuk melihat **pemahaman dan partisipasi masyarakat** terhadap isu-isu HAM di Indonesia

RESEARCH OBJECTIVE

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang *KOMPAS* untuk melakukan **Survei Refleksi 20 Tahun Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

KEY SUBJECT

1. **Undang – Undang No.39 Tahun 1999**
2. **Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



Cakupan Penelitian

Kajian ini mengevaluasi penilaian publik terhadap UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta lembaga Komnas HAM

AWARENESS
Mengetahui **persepsi** Publik terhadap subjek (konsep, ide, gagasan, produk, dll)

APPEAL
Mengetahui sejauh mana subjek tersebut relevan, **menarik** dan sesuai dengan apa yang diharapkan publik

ASK
Mengetahui sejauh mana subjek tersebut dipahami dan lewat media apa publik mendapatkan **informasi** lebih lanjut

ACT
Mengetahui **perilaku** publik yang timbul sebagai dampak internalisasi dari subjek tersebut terhadap publik

AFFECT
Mengetahui sejauh mana publik merasa **puas dan terjadi perubahan** di masyarakat sekitarnya terkait penerapan subjek tersebut

EVALUASI PUBLIK TERHADAP UU No.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA & KOMNAS HAM

Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview*

- ✓ Menggunakan kuesioner
- ✓ Durasi wawancara maksimal 60 menit
- ✓ Wawancara dilakukan oleh interviewer lapangan terlatih
- ✓ Menjangkau lebih banyak responden (dalam jumlah ratusan responden)
- ✓ Analisa dilakukan secara statistik deskriptif
- ✓ Tidak bertujuan mendapatkan alasan mendalam atas pertanyaan: "mengapa"



Metodologi Penelitian

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview*

RESPONDEN	
Usia	17 – 65 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki & Perempuan (proporsional 50:50)
SEC	Bawah – Menengah – Atas (distribusi normal)
Wilayah Penelitian	34 Provinsi di Indonesia
Jumlah Responden	1,200 responden ; *sampling error* +/- 2.8%



LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN

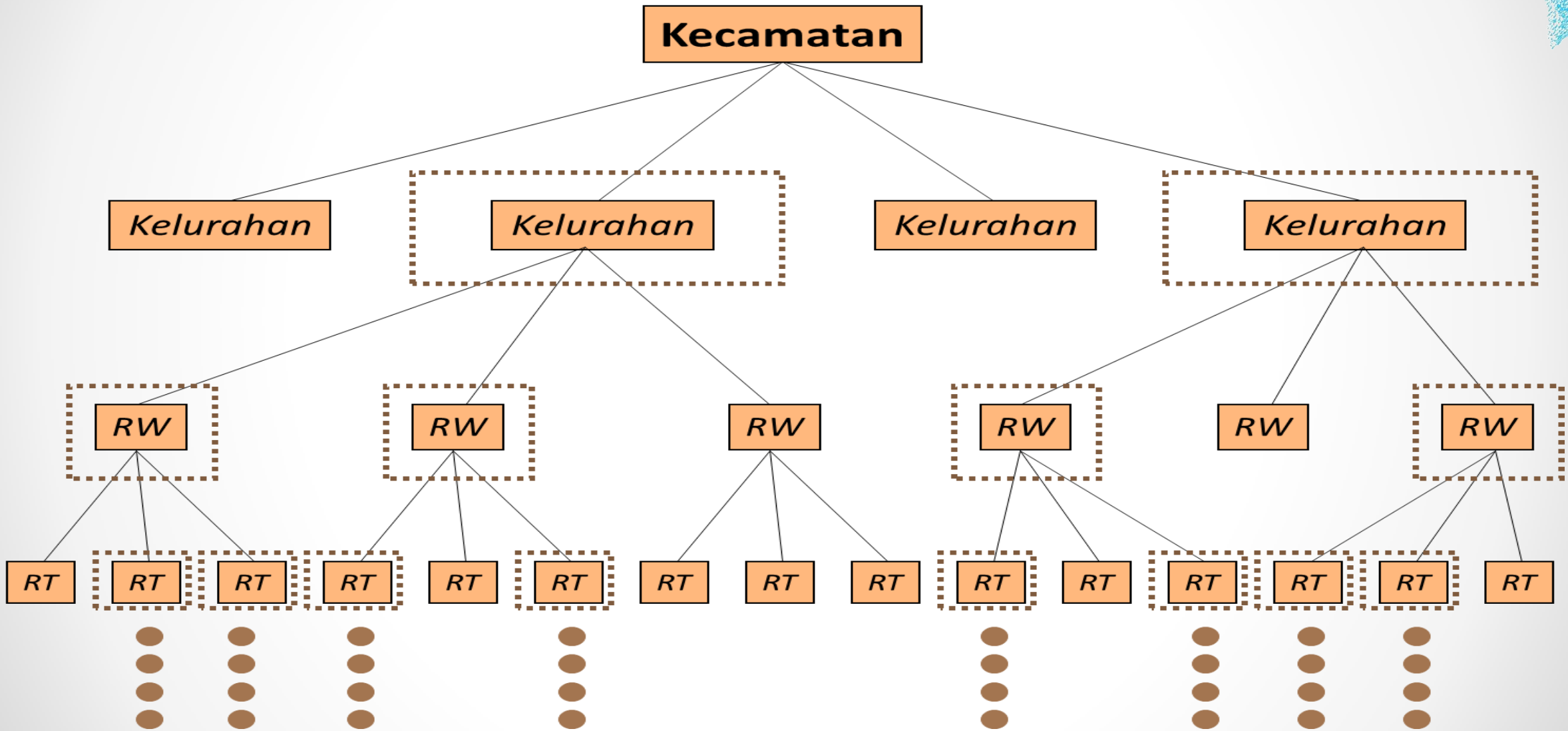


Wilayah Penelitian

Penelitian dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia



Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Multistage Random Sampling*



Timeline

Kuantitatif Survei - *Face to Face Interview* - 12 Weeks

Activity	Week											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Preparation												
Instrument Construction F2F												
Field				23 September – 4 Oktober 2019								
QC, Coding, dan Data Entry												
Analysis dan Reporting												
Presentation												

N= 1,200 respondent ; SE = 2.8%

LATAR BELAKANG & TUJUAN

CAKUPAN & METODOLOGI PENELITIAN

WILAYAH PENELITIAN

HASIL PENELITIAN



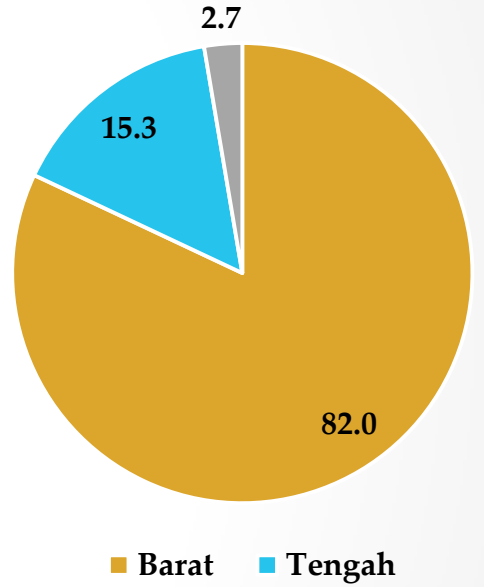
Profil Responden

Responden sudah mewakili populasi Indonesia secara proporsional

No.	Provinsi	N	(%)
1.	D.I Aceh	25	2.1
2.	Bali	16	1.3
3.	Banten	56	4.7
4.	Bengkulu	8	0.7
5.	D.I Yogyakarta	16	1.3
6.	DKI Jakarta	48	4.0
7.	Gorontalo	8	0.7
8.	Jambi	16	1.3
9.	Jawa Barat	220	18.3
10.	Jawa Tengah	172	14.3
11.	Jawa Timur	192	16.0
12.	Kalimantan Barat	24	2.0
13.	Kalimantan Selatan	15	1.3
14.	Kalimantan Tengah	16	1.3
15.	Kalimantan Timur	12	1.0
16.	Kalimantan Utara	4	0.3
17.	Kepulauan Bangka Belitung	8	0.7

No.	Provinsi	N	(%)
18.	Kepulauan Riau	8	0.7
19.	Lampung	36	3.0
20.	Maluku	8	0.7
21.	Maluku Utara	8	0.7
22.	Nusa Tenggara Barat	24	2.0
23.	Nusa Tenggara Timur	24	2.0
24.	Papua	8	0.7
25.	Papua Barat	8	0.7
26.	Riau	28	2.3
27.	Sulawesi Barat	8	0.7
28.	Sulawesi Selatan	40	3.3
29.	Sulawesi Tengah	16	1.3
30.	Sulawesi Tenggara	8	0.7
31.	Sulawesi Utara	8	0.7
32.	Sumatera Barat	8	0.7
33.	Sumatera Selatan	36	3.0
34.	Sumatera Utara	68	5.7
	Total Responden	**1.200**	**100 %**

Berdasarkan pembagian wilayah (%)



Wilayah Barat : Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah

Wilayah Tengah: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara

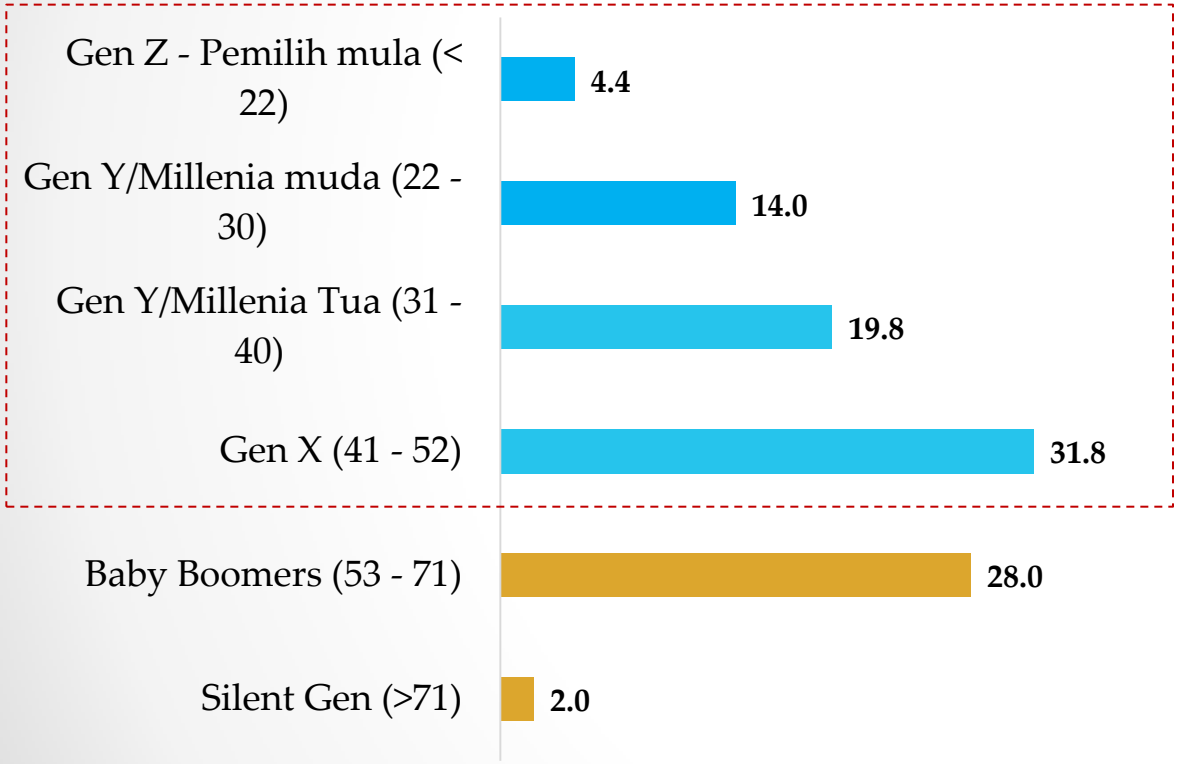
Wilayah Timur : Maluku dan Papua

N = 1.200; SE = ±2,8%

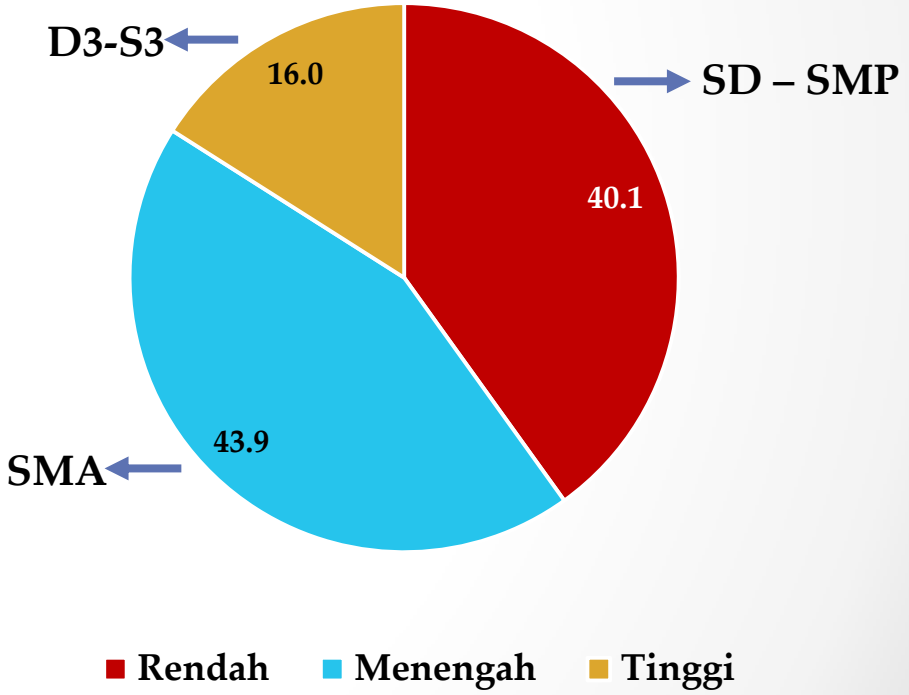
Profil Responden

Proporsi kelompok usia produktif lebih besar, dengan tingkat pendidikan lulusan menengah dan tinggi

Usia (%)



Tingkat Pendidikan (%)

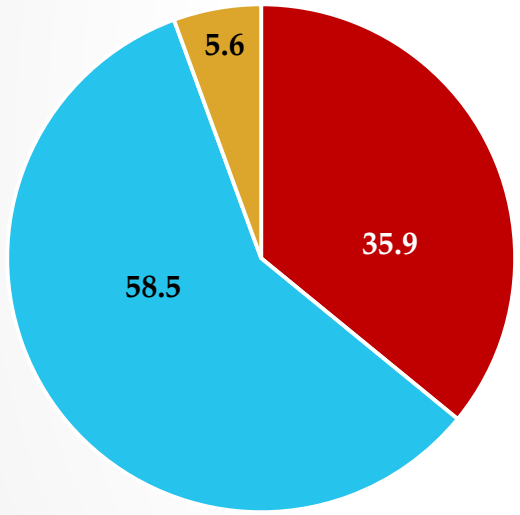


N = 1.200; SE = ±2,8%

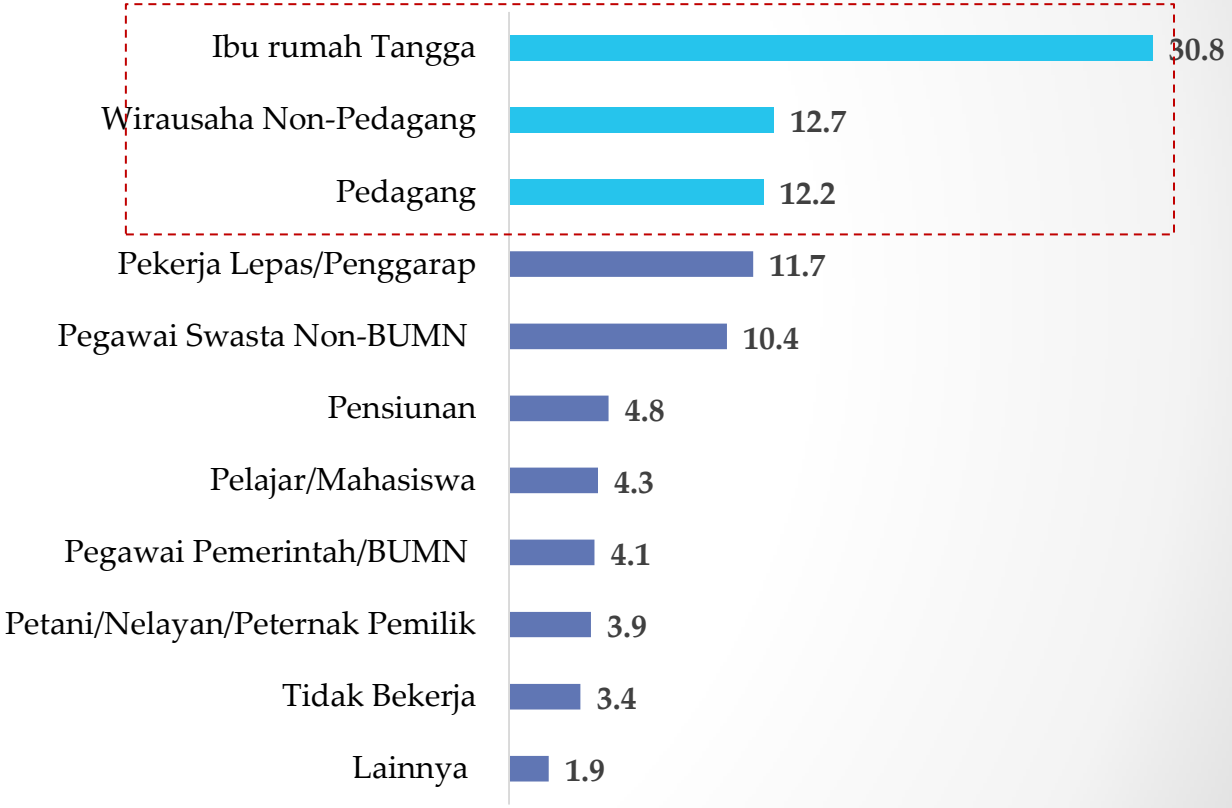
Profil Responden

Sebagian besar responden berasal dari kelas ekonomi bawah dan menengah

Kelas Sosial Ekonomi (%)



Pekerjaan (%)

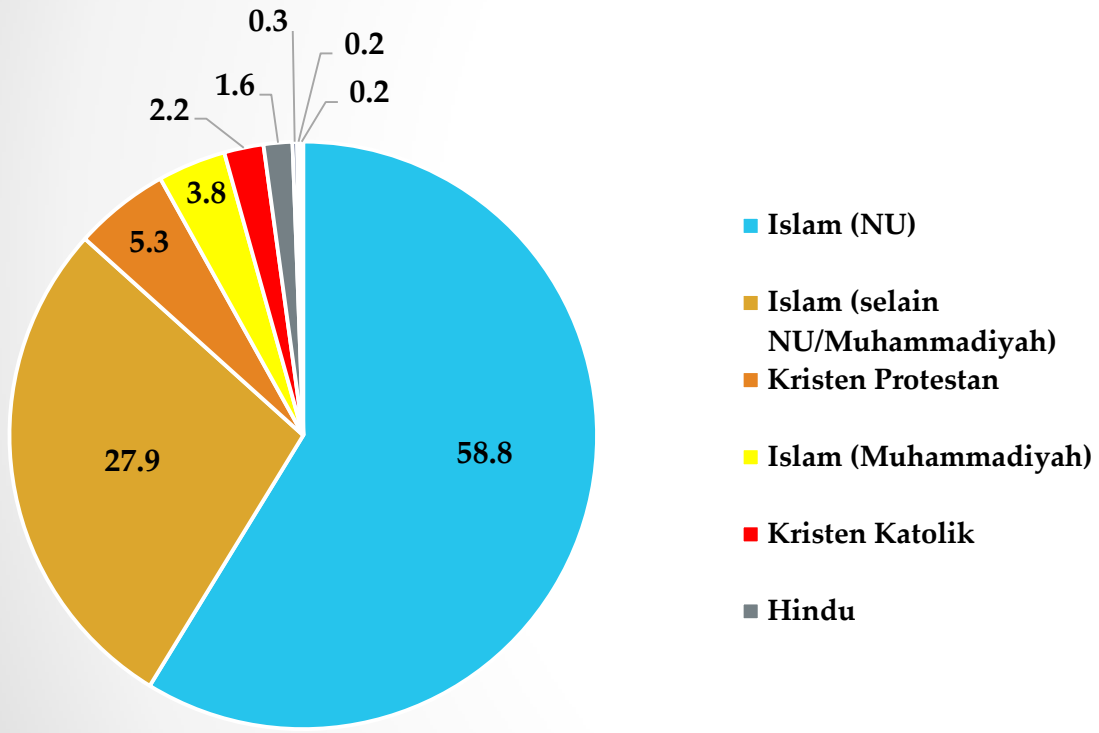


N = 1.200; SE = ±2,8%

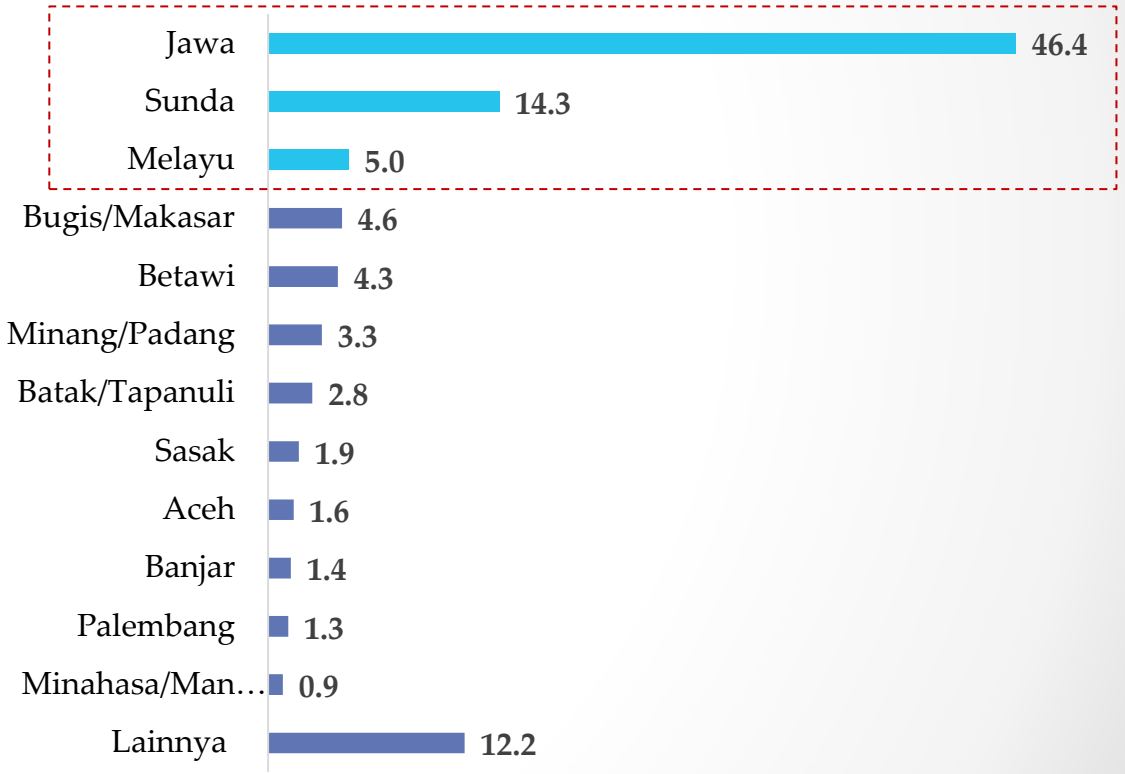
Profil Responden

Sebagian besar responden beragama Islam dengan suku terbanyak Jawa, Sunda dan Melayu

Berdasarkan agama (%)



Berdasarkan suku bangsa (%)

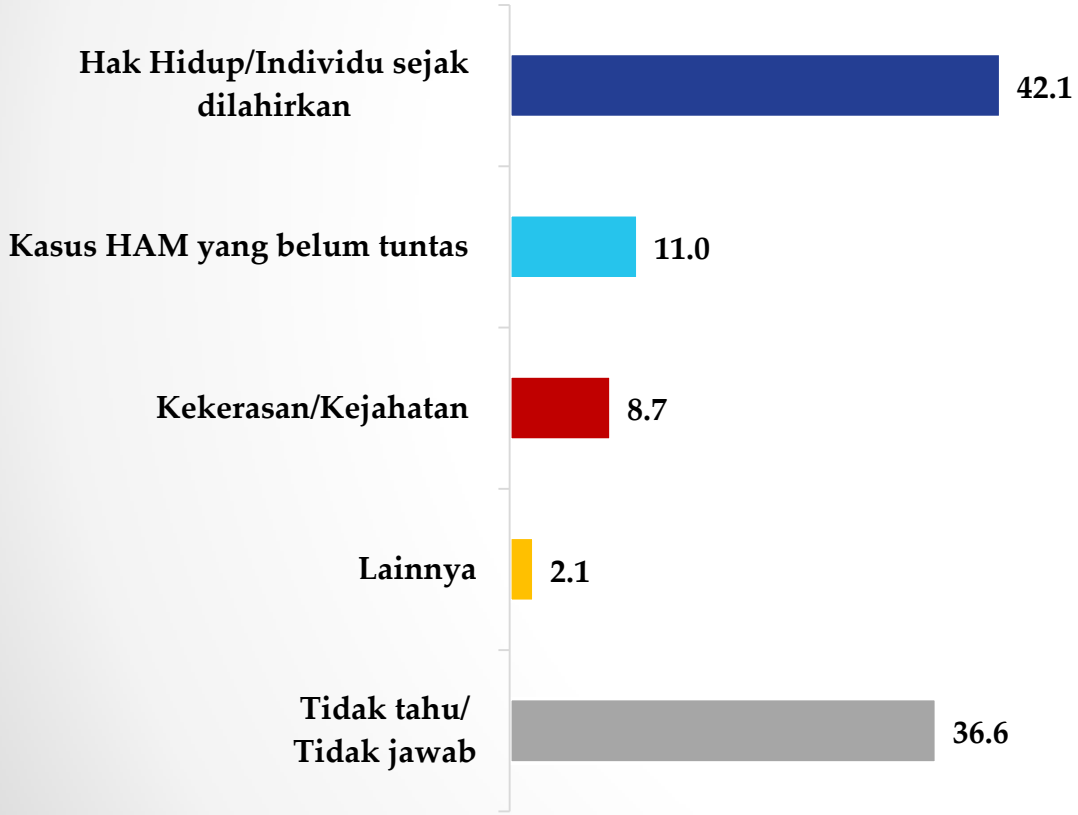


N = 1.200; SE = ±2,8%

Top of Mind responden terhadap frasa "Hak Asasi Manusia"

Sebagian responden cukup memahami Hak Asasi Manusia, ada yang mengaitkan dengan kasus tertentu, dan ada juga yang menjawab tidak tahu

Asosiasi responden terhadap frasa Hak Asasi Manusia (%)

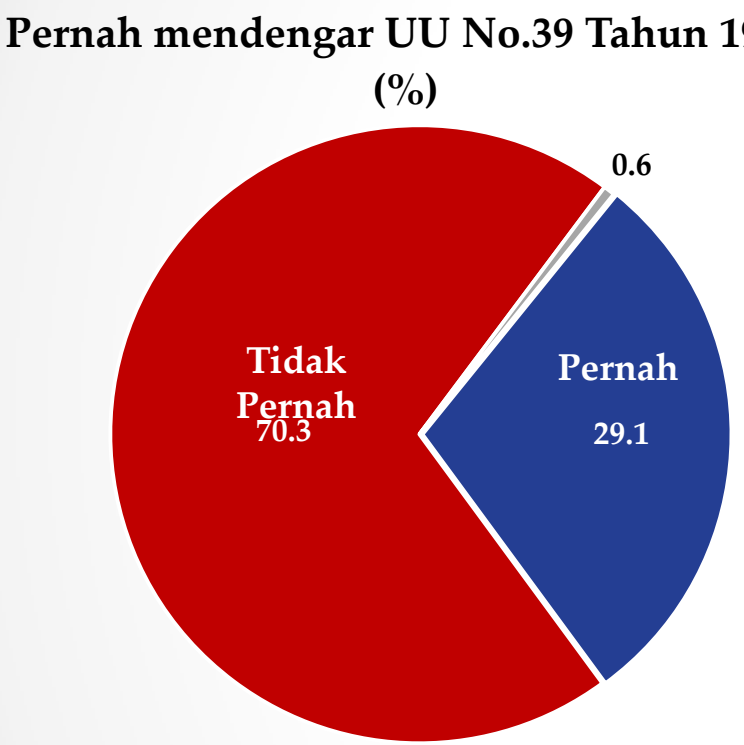


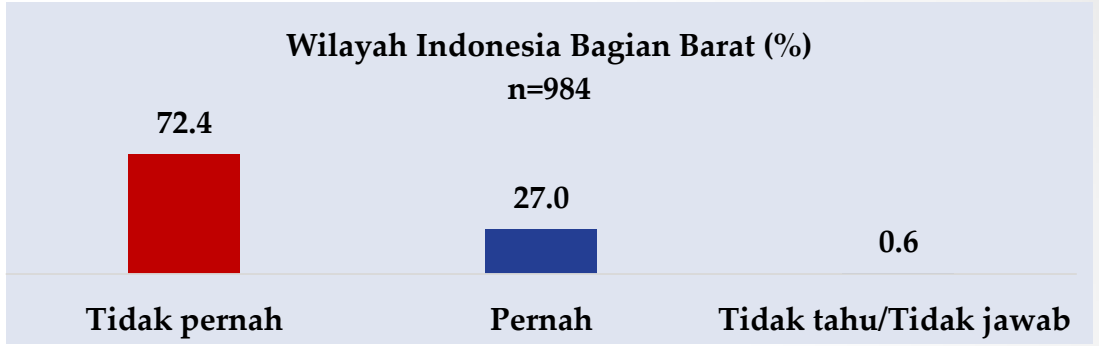
Hak Hidup/Individu sejak dilahirkan	Kasus HAM yang belum tuntas	Kekerasan/Kejahatan
Hak untuk Hidup Aman & Sejahtera	Kasus Papua	Pelanggaran
Milik Semua Orang	Kasus Novel Baswedan	Penindasan
Hak Mendapat Pendidikan	Kasus Marsinah	Pelecehan/Diskriminasi
Menghargai/Menghormati	Kasus Munir	Intimidasi
Keadilan/Kesetaraan Sebagai Warga Negara	Orde Baru 1998	Rasis
Hak Mendapat Perlindungan	Konflik Aceh	Konflik

N = 1.200; SE = ±2,8%

Awareness terhadap UU No.39 tahun 1999

Mayoritas responden tidak pernah mendengar/membaca tentang UU No.39 tahun 1999





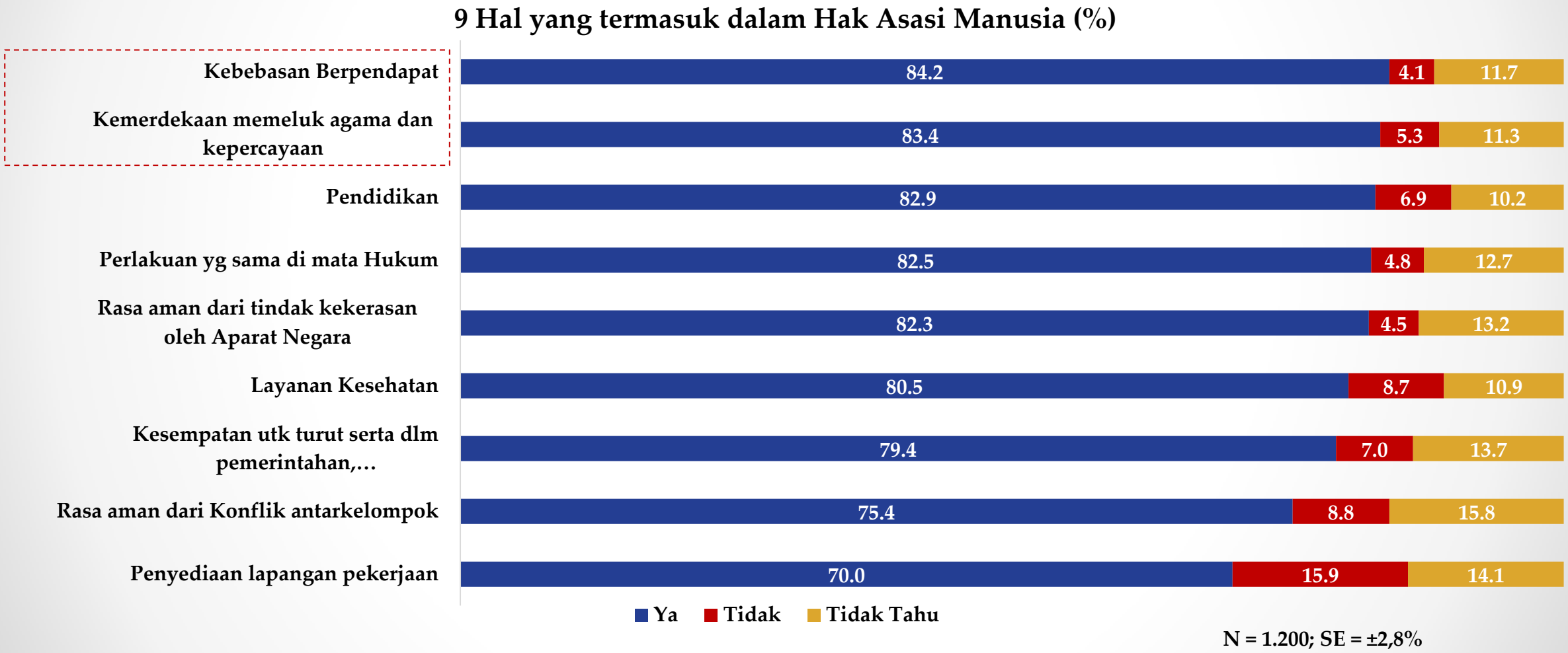




N = 1.200; SE = ±2,8%

Pemahaman terhadap HAM

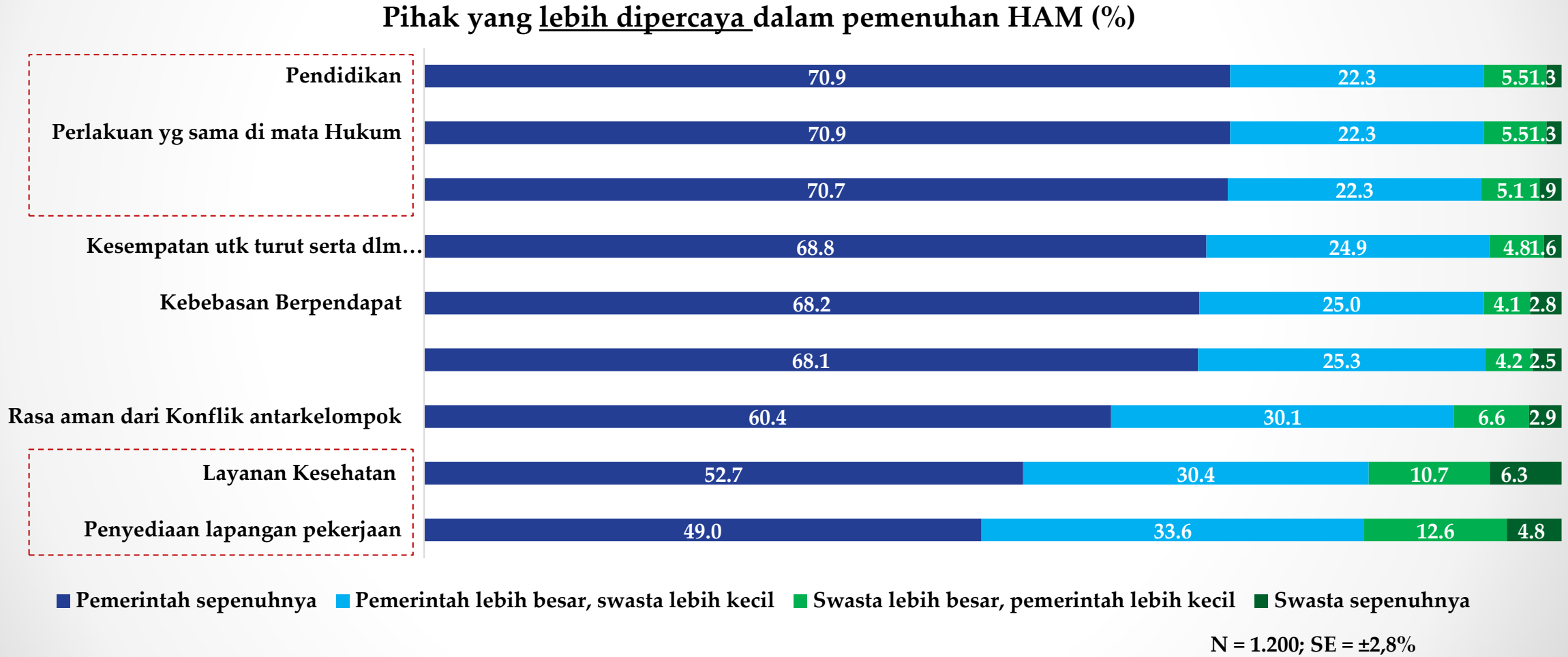
Responden menilai kebebasan berpendapat dan kemerdekaan memeluk agama/kepercayaan merupakan dua hal tertinggi yang termasuk dalam HAM



N = 1.200; SE = ±2,8%

Pihak yang dipercaya dalam pemenuhan HAM

Dalam pemenuhan HAM, pemerintah paling dipercaya di bidang pendidikan dan perlakuan yang sama di mata hukum, paling kecil di bidang lapangan kerja dan kesehatan

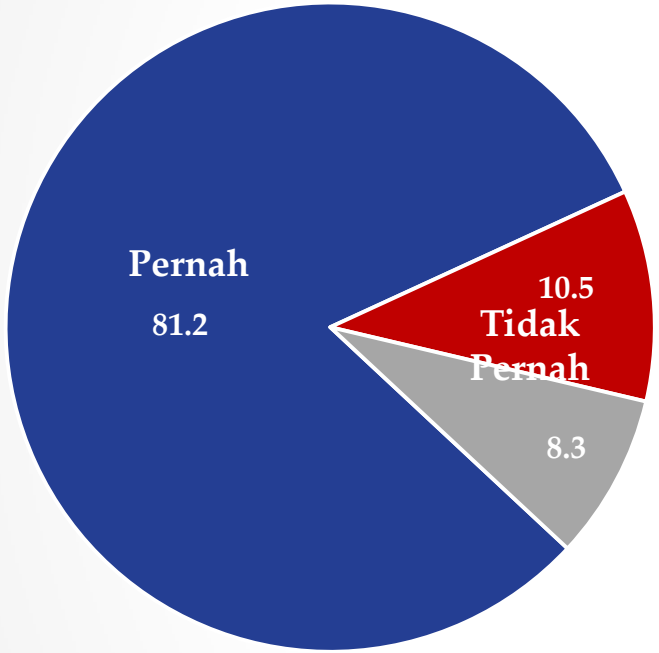


N = 1.200; SE = ±2,8%

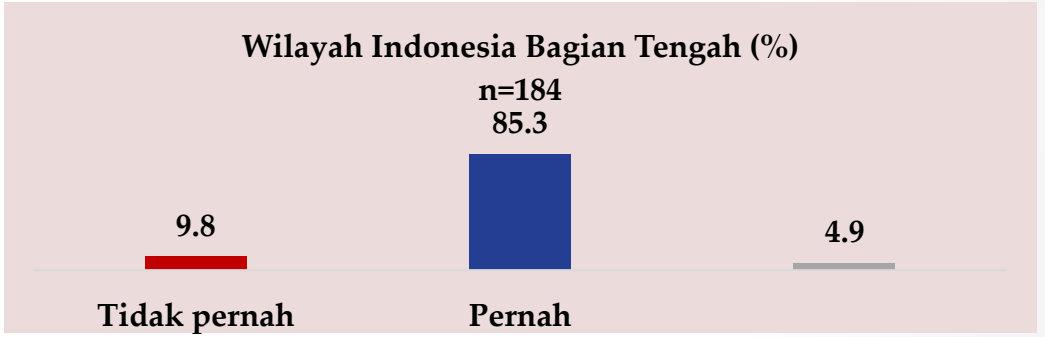
Awareness terhadap lembaga Komnas HAM

Mayoritas responden mengetahui keberadaan Lembaga Komnas HAM

Pernah mendengar Komnas HAM (%)





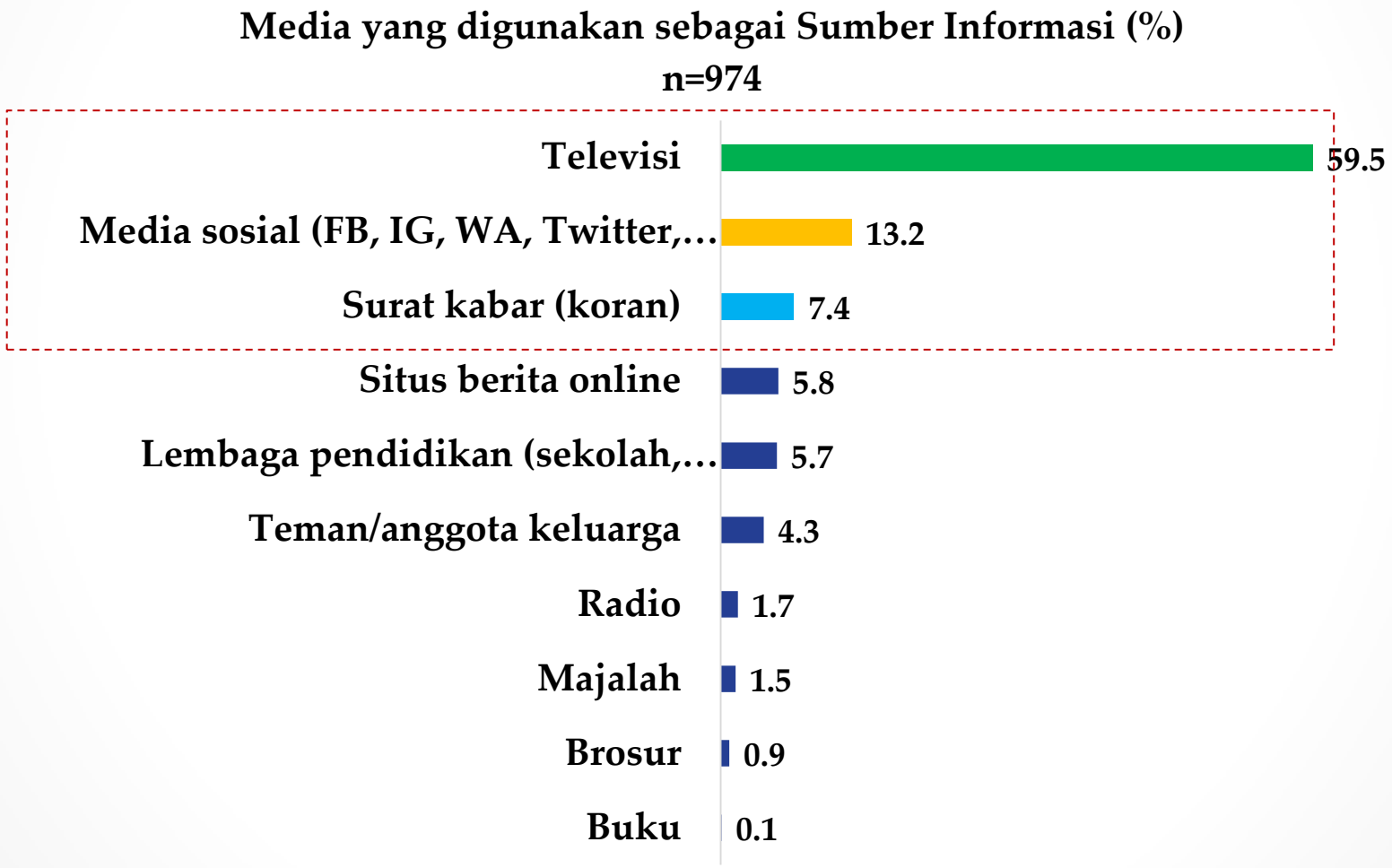




N = 1.200; SE = ±2,8%

Sumber Informasi tentang Komnas HAM

Televisi, media sosial dan surat kabar menjadi sumber informasi utama responden terkait dengan lembaga Komnas HAM

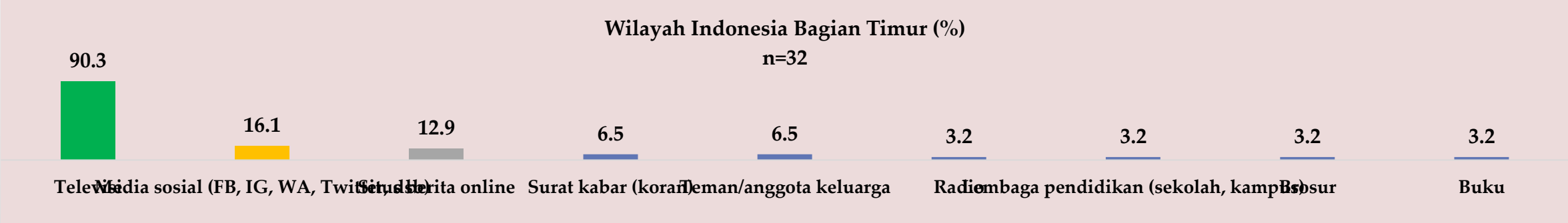


Sumber Informasi tentang Komnas HAM

Hal tersebut berlaku di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur



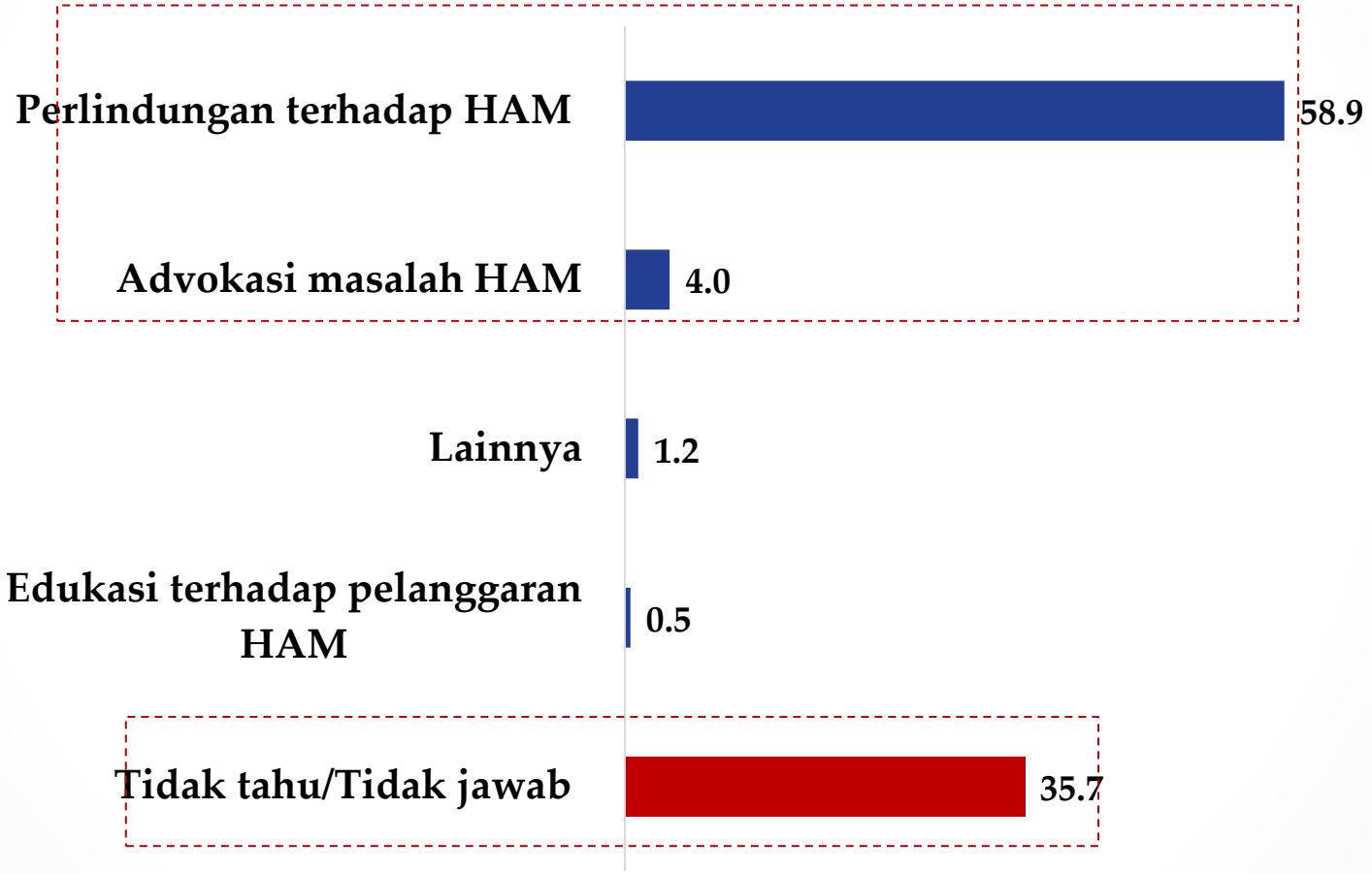




Peran Lembaga Komnas HAM

Mayoritas responden telah memahami tugas utama Komnas HAM, namun masih ada sebagian yang tidak tahu

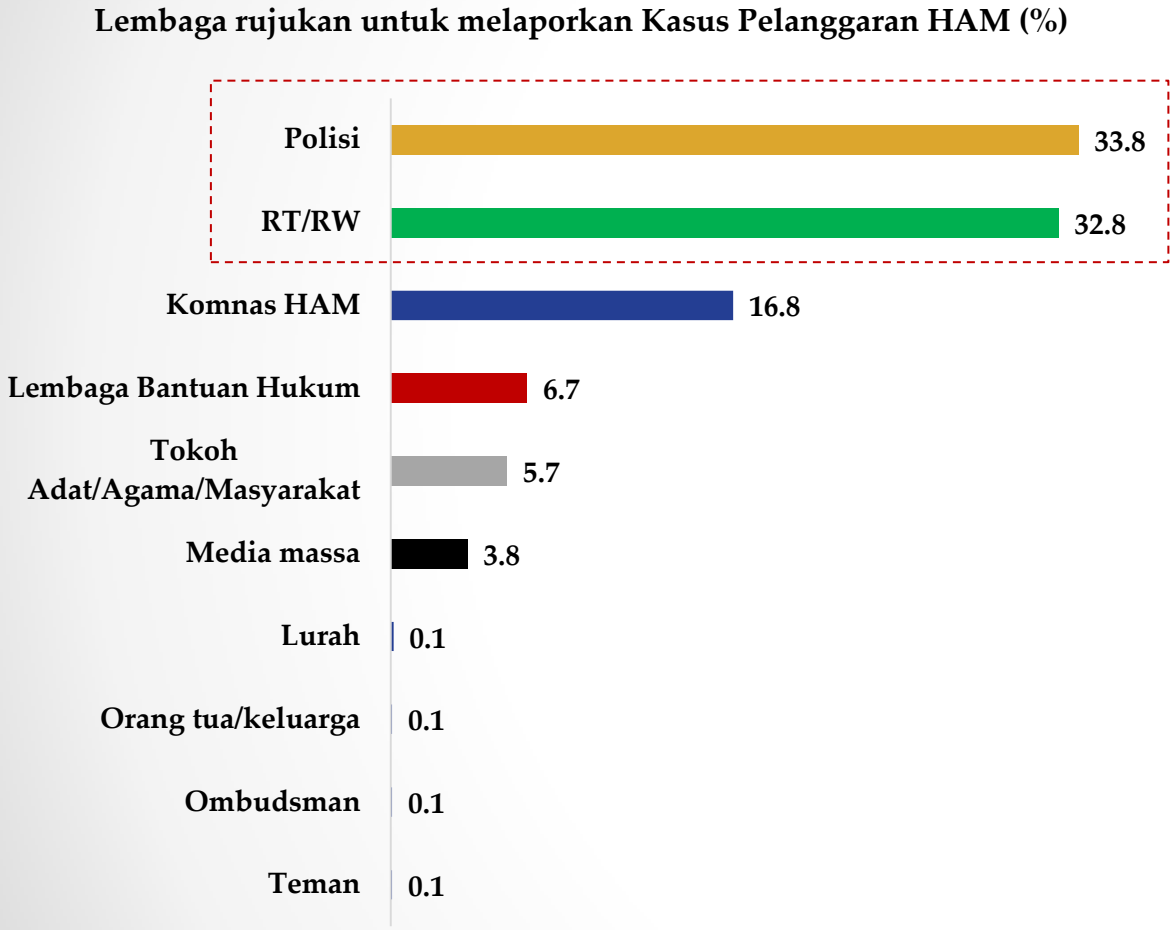
Awareness terhadap tugas utama Komnas HAM (%)



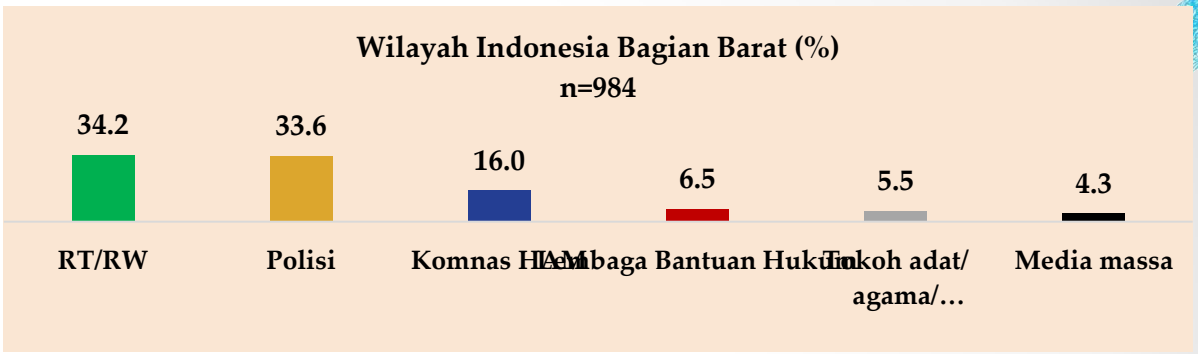
N = 1.200; SE = ±2,8%

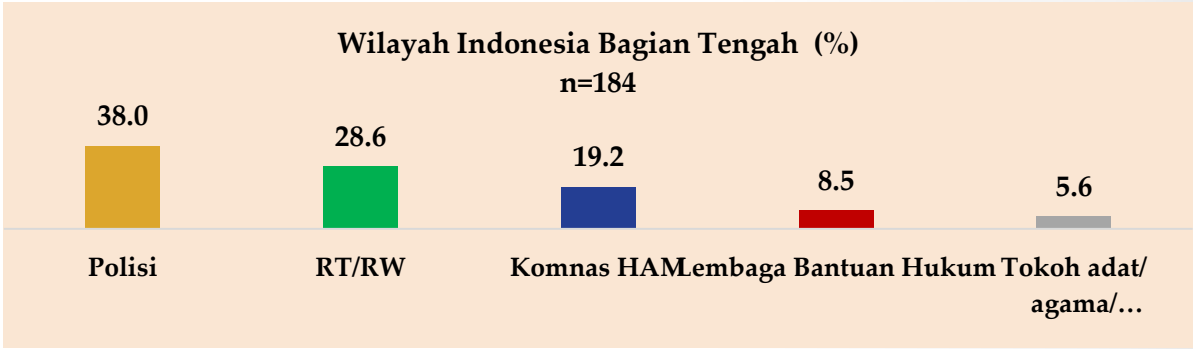
Preferensi Institusi terkait pelanggaran HAM

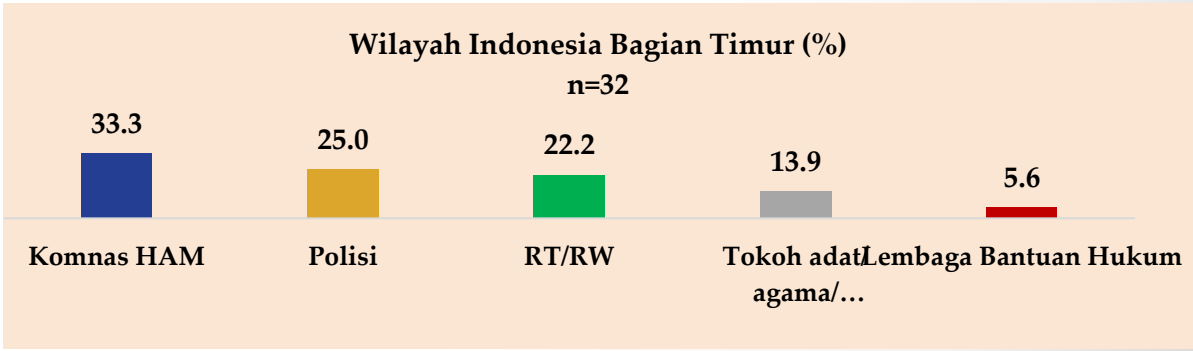
Pihak yang paling mudah dijangkau menjadi pilihan utama mayoritas responden



N = 1.200; SE = ±2,8%

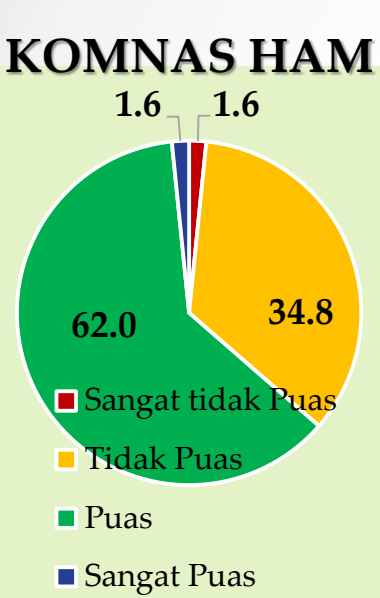


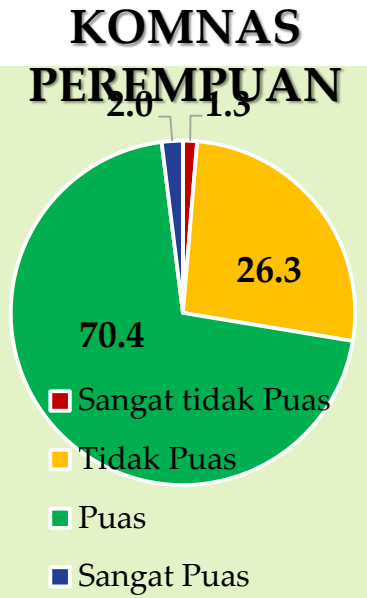


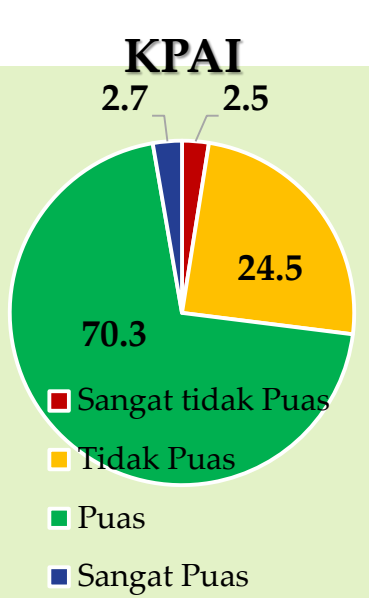


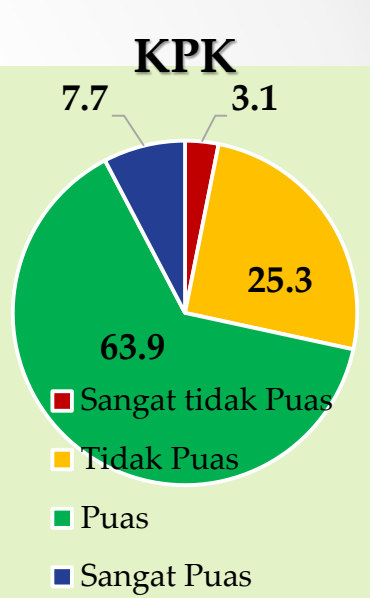
Tingkat Kepuasan terhadap Komnas HAM

Apresiasi terhadap kinerja Komnas HAM belum setinggi komisi lainnya

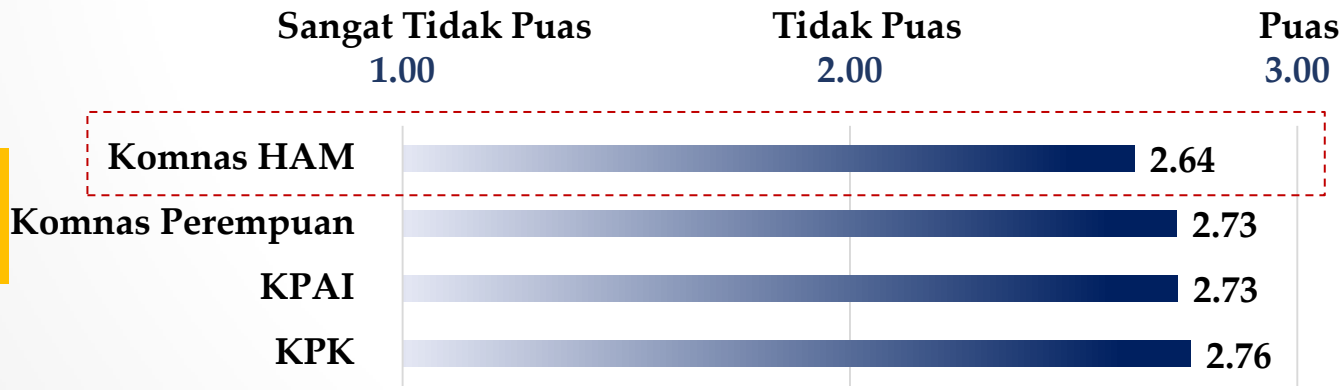








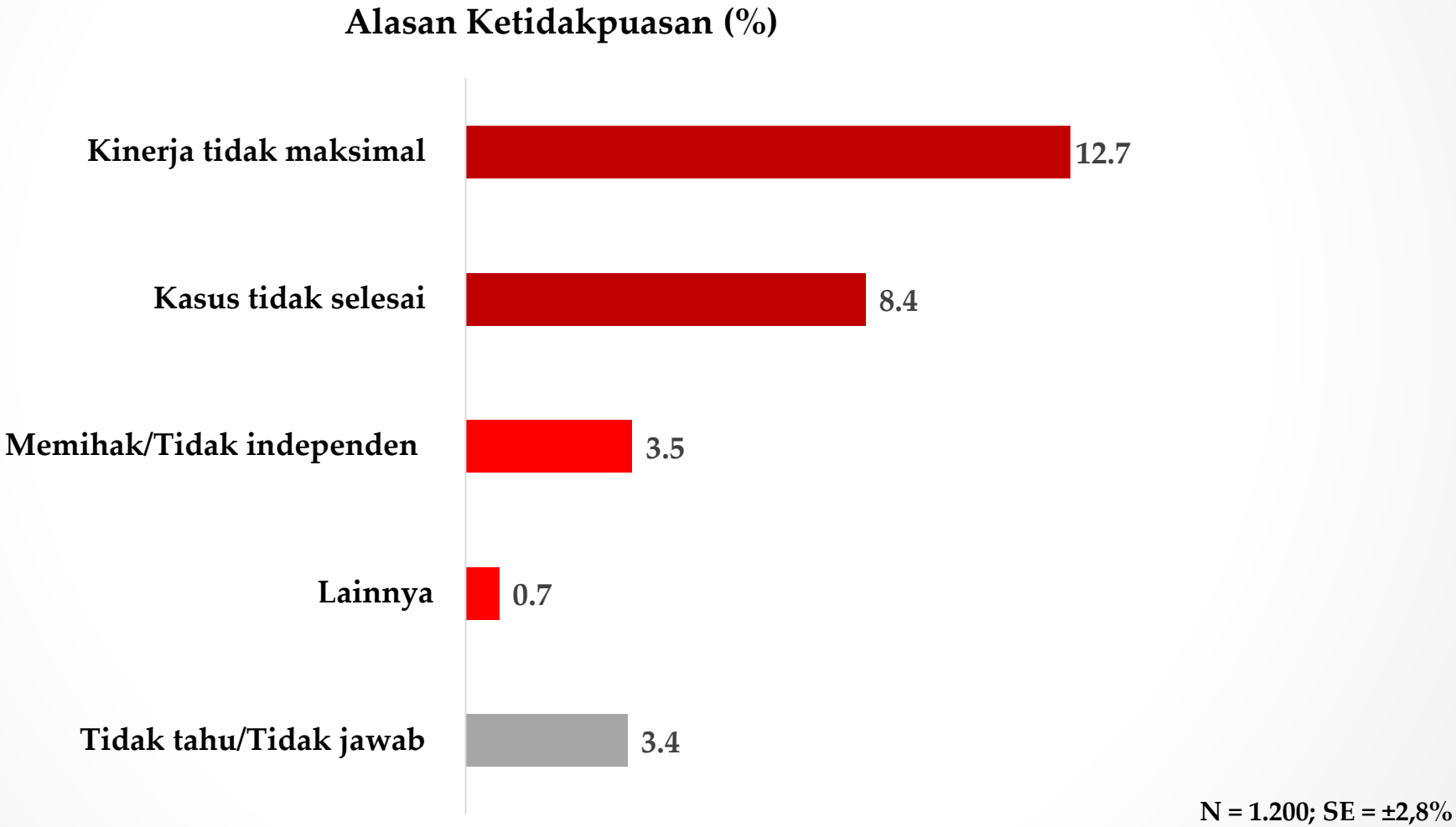
INDEKS KEPUASAN



N = 1.200; SE = ±2,8%

Alasan mereka yang tidak puas terhadap Komnas HAM

Kinerja yang tidak maksimal dan kasus yang tidak selesai menjadi catatan penting dari responden yang tidak puas

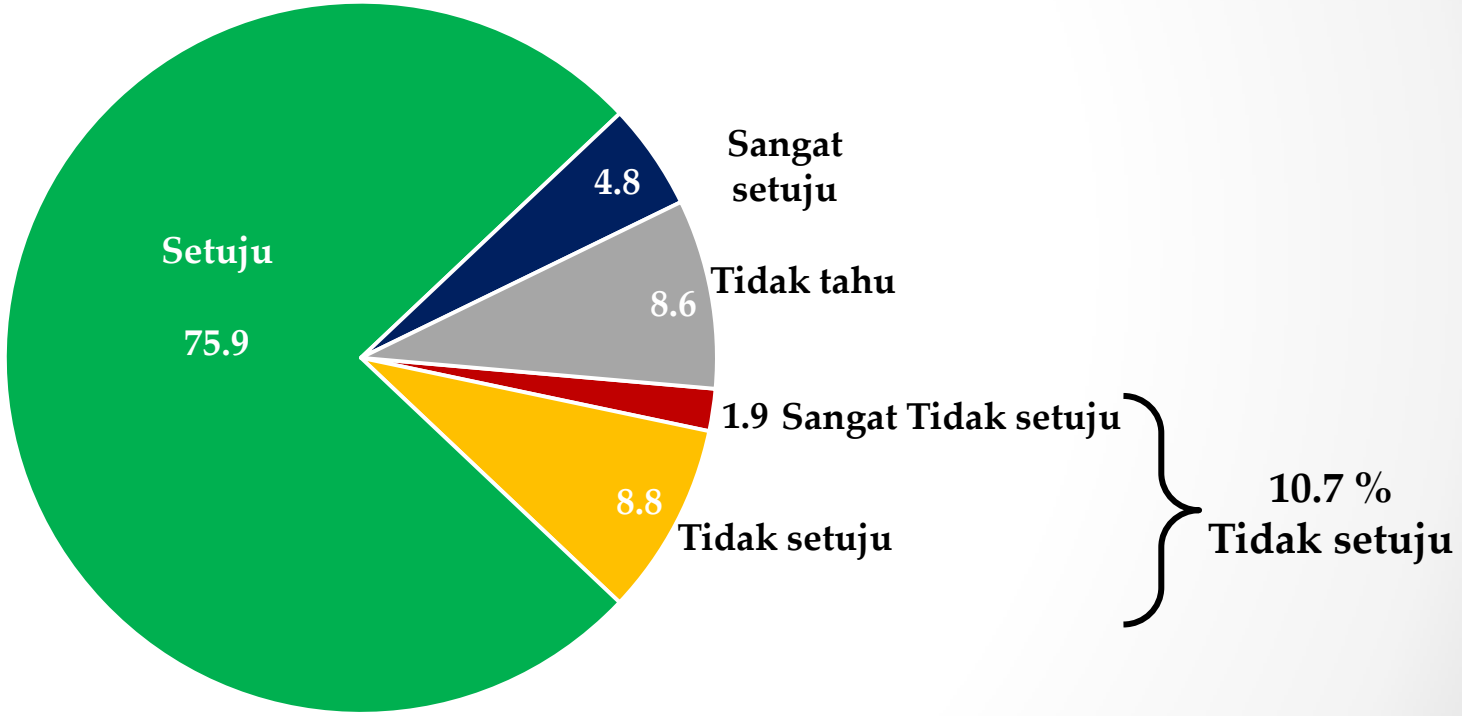


N = 1.200; SE = ±2,8%

Penguatan kelembagaan Komnas HAM

Mayoritas responden mendukung kewenangan Komnas HAM diperkuat

Komnas HAM diberi Kewenangan Penyelidikan dan Penindakan (%)



N = 1.200; SE = ±2,8%

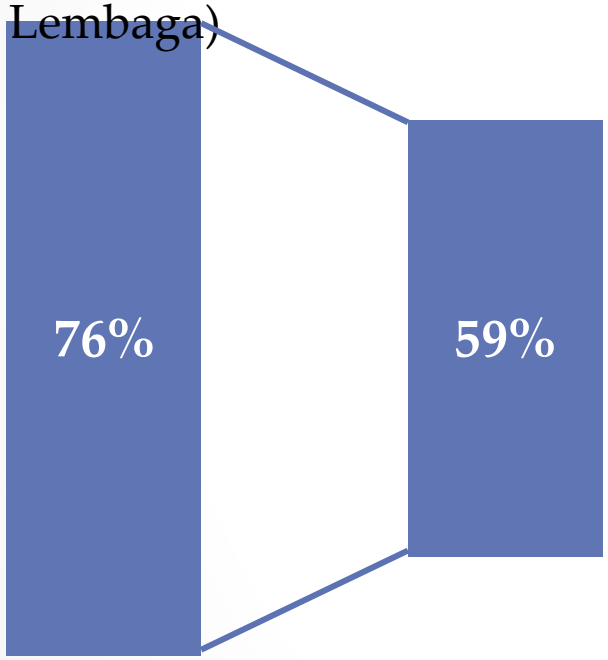
Perbandingan Kinerja 2018 dan 2019

Terjadi peningkatan terhadap kinerja lembaga Komnas HAM di tahun 2019

2018

Awareness Lembaga (Kepuasan thd Lembaga)

Affect

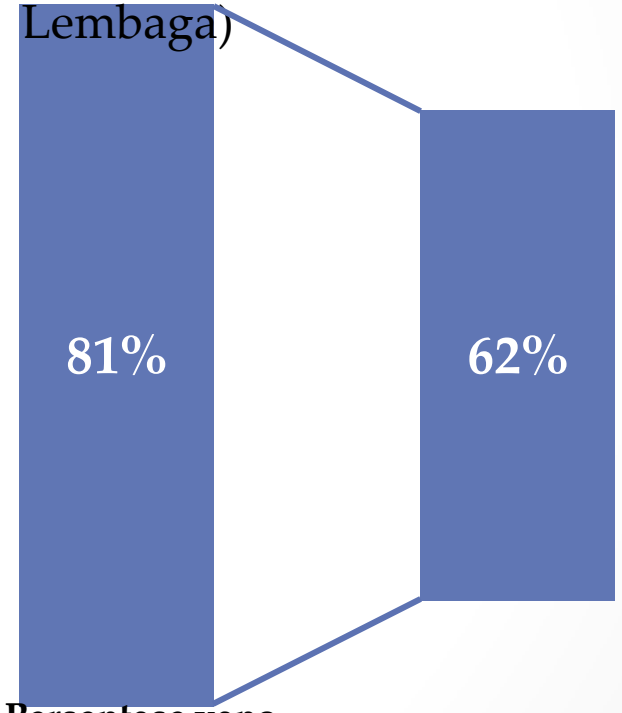


Persentase yang belum tahu keberadaan Komnas HAM = 24%

2019

Awareness Lembaga (Kepuasan thd Lembaga)

Affect



Persentase yang belum tahu keberadaan Komnas HAM = 19%

Kesimpulan dan Rekomendasi (1)

- Program untuk Sosialisasi HAM masih perlu ditingkatkan, terbukti dari masih banyak yang tidak tahu dan lebih mengaitkannya dengan kasus-kasus HAM
- Advokasi Komnas HAM sebaiknya diarahkan pada bidang pendidikan dan perlakuan yang sama di Mata HUKUM
- Meskipun publik tidak *aware* dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM tapi cukup paham dengan kontennya
- Komnas HAM perlu bersinergi lebih baik dengan kepolisian dan pemerintah daerah (RT/RW) dalam melakukan advokasi dan penanganan kasus HAM

Kesimpulan dan Rekomendasi (2)

- Agar kinerja Komnas HAM lebih optimal, pemerintah perlu memperkuat lembaga Komnas HAM dengan memberikan kewenangan yang lebih besar
- Dibandingkan dengan tahun 2018, terjadi peningkatan penilaian terhadap kinerja Komnas HAM
- Media televisi adalah sumber informasi utama bagi masyarakat tentang lembaga Komnas HAM. Media sosial dan surat kabar patut dipertimbangkan sebagai saluran komunikasi publik



TERIMA KASIH